

PERILAKU PEMILIH DALAM KONTEKS SEGREGASI SOSIAL PASCA KONFLIK DI AMBON

Jurnal Analisa Sosiologi

Oktober 2018, 7(2): 181-200

David Timothy Lamerlabel¹, Izak Lattu

Abstract

Religion based residential separation that takes place in Ambon is an existence pattern which has lasted for a long time. This religion based residential separation is getting stronger when Ambon faced prolonged religion conflict. The strengthening of segregation path in Ambon also brings some impacts and big effects in every dimension, not only in social, culture, and economy, but also in politic that takes place in Ambon. In direct politic (regional head election), for example, there is a tendency that a person will be close only with his/her group and religion than with people of other religions. This research method uses descriptive qualitative method. This research finds that environment similarity factor still affects voter behavior on a candidate. Besides that, the voter also shows the degree of commonality of choice or political preference in the voter's family environment. Then, voters in deciding his/her choice also puts forward his/her perception on the candidate and then determines his/her decision. Furthermore, there are also voters who poll for a candidate based on the programs that he/she offers.

Keywords: *Voter Behavior, Segregation, Conflict*

Abstrak

Keterpisahan permukiman berbasis keagamaan yang terjadi di Kota Ambon adalah sebuah pola keberadaan yang telah terjadi sejak dulu. Keterpisahan permukiman berbasis agama ini semakin menguat ketika Ambon mengalami konflik Agama yang berkepanjangan. Menguatnya jalur segregasi di Kota Ambon memberikan dampak dan pengaruh besar pada setiap dimensi, bukan saja sosial, budaya, dan ekonomi tetapi juga politik yang terjadi di Kota Ambon. Dalam politik langsung (pilkada) misalnya kecenderungan orang akan akrab dengan sesama kelompok dan agamanya dibandingkan yang beragama lain. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa faktor kesamaan daerah masih mempengaruhi perilaku pemilih terhadap seorang kandidat. Selain itu, pemilih juga menunjukkan tingkat kesamaan pilihan atau preferensi politik di lingkungan keluarga pemilih. Kemudian pemilih dalam menjatuhkan pilihannya juga mengedepankan persepsi terhadap

¹Program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana

¹davidtimothi.lamerlabel@gmail.com

kandidat dan kemudian menentukan sikap. Selain itu ada pemilih juga yang memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan kandidat.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Segregasi, Konflik

PENDAHULUAN

Segregasi Permukiman di Kota Ambon berbasis keagamaan adalah sebuah pola keberadaan yang telah terjadi sejak lama, faktor sejarah memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembentukan pola permukiman tersebut, oleh karena itulah keberadaan segregasi tersebut merupakan sebuah kenyataan yang kini dihadapi. Masyarakat kota Ambon. Masyarakat kota Ambon bukan saja mewarisi watak pluralisme tetapi sekaligus ditandai oleh sifat segregatif yang ketat berbasis agama hal ini diwujudkan secara nyata dalam pemilahan kluster-kluster permukiman menurut garis keagamaan (Tomagola et. Al., 2005).

Segregasi di kota Ambon cenderung mempengaruhi ruang-ruang publik lainnya seperti ruang ekonomi yang terkesan baik akan tetapi pada kenyataannya memiliki pola terpisah secara halus, ruang-ruang pelayanan publik lain seperti, pendidikan yang paling dasar sampai ke perguruan tinggi yang pada notabene di doktrin lebih di kuasai oleh salah satu kelompok tertentu.

Demikian juga dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan dan birokrasi yang terpengaruh dengan segregasi agama seperti penelitian tentang Reformasi birokrasi Maluku pasca konflik pada level kelompok lingkungan pemerintah kota, yang mengatakan bahwa secara ideal kantor Walikota adalah wilayah netral tempat dimana interaksi kelompok bisa berlangsung dengan baik, akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak dapat terwujud dengan sepenuhnya yang mana telah menggiring masing-masing PNS untuk mengelompok berdasarkan agama (Tamrin, Cornelis, Pentury Rosa, 2005).

Konflik agama yang terjadi di kota Ambon juga memiliki dampak psikologis tersendiri, dimana masyarakat masih merasa trauma dan hidup dalam ketakutan sehingga rasa saling curiga itu masih ada di antara

kelompok Muslim Kristen yang hidup secara terpisah. Akibat dari rasa takut dan trauma yang kini dihadapi pada akhirnya membuat para pengungsi memilih alternatif lain yaitu memilih pemukiman baru yang seagama. Para pengungsi sebagian besar juga berinisiatif melakukan barter tempat tinggal dengan warga yang berbeda agama untuk memperoleh rumah baru di pemukiman yang seagama. Pengungsi yang beragama Kristen memilih tinggal di pemukiman yang mayoritas beragama Kristen, demikian juga pengungsi yang beragama Muslim yang mulai membangun rumahnya di pemukiman-pemukiman yang 100% beragama Muslim.

Hal ini menjadi masalah bagi pemerintah Kota Ambon, menguatnya jalur segregasi di Kota Ambon memberikan dampak dan pengaruh besar pada setiap dimensi, bukan saja sosial, budaya, dan ekonomi tetapi juga politik yang terjadi di Kota Ambon. Dalam politik langsung seperti pemilihan umum misalnya kecenderungan orang akan akrab dengan sesama agama dibandingkan orang yang beragama lain dalam menentukan pilihannya.

Menurut Paul F. Lazarsfeld dan rekan kerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University dalam pendekatan sosiologisnya mengatakan Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu yaitu status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan pemilih tersebut.

Selain itu (Dieter Roth, 2008) Menjelaskan bahwa faktor agama menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks pendekatan Sosiologis. Selain pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis juga bisa digunakan dalam menganalisa perilaku pemilih dalam pemilihan.

Menurut Surbakti perilaku memilih adalah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perilaku pemilih. Misalnya saja memilih karena berdasarkan isu-isu dan kebijakan politik, memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, dan memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada

ketokohan figur tertentu. Untuk itu berdasarkan permasalahan di atas penelitian tentang Perilaku Pemilih Dalam Konteks Segregasi Sosial Pasca Konflik di Kota Ambon dilakukan agar bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di Kota Ambon yang segregasi bermukimnya berbasis agama.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di 5 desa yang mewakili 5 kecamatan Kota Ambon. Penelitian ini menempatkan individu sebagai unit analisis. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa individu di Indonesia belum mandiri dan tergantung pada kelompok atau patron yang perlu dikritisi lagi, karena dalam beberapa pemilihan yang sudah dilaksanakan, ada kecenderungan pemilih lebih independent dalam memilih calonnya, tidak terikat erat dalam kelompok dan tidak terbelenggu dalam struktur sosial. Inilah sudut pandang lain terhadap kajian pemilih yang diangkat dalam penelitian ini dengan menempatkan individu sebagai unit analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, Kota Ambon terletak di sebagian besar wilayah Kepulauan Ambon dengan luas keseluruhan 377 Km² sesuai dengan peraturan pemerintah No. 13 Tahun 1979. Luas daratan Kota Ambon adalah 359,45 Km² berdasarkan survey tata guna tanah tahun 1980. Jika dilihat dari segi administrasi, Kota Ambon merupakan pusat pemerintahan provinsi Maluku sejak ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Maluku tahun 1958. Oleh karenanya, pusat-pusat birokrasi pun berada di Kota Ambon, seperti kantor Gubernur dan dinas-dinas terkait di level provinsi, kantor DPRD provinsi Maluku, dan juga markas besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Keberadaan pusat-pusat kekuasaan ini menjadikan Kota Ambon wilayah yang strategis untuk melakukan koordinasi pemerintahan dan pembuatan kebijakan di provinsi Maluku. Pasca-konflik komunal 1999-

2002, kantor-kantor dan pusat-pusat pemerintahan yang dahulu porak-poranda sudah diperbaiki. Tak hanya itu, kondisi keamanan juga relatif sudah kondusif sehingga mendorong kegiatan-kegiatan pemerintahan di ibu kota provinsi Maluku ini kembali normal.

Kota Ambon terdiri atas lima kecamatan, yakni kecamatan Sirimau, Nusaniwe, Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan. Terdapat pula 50 kelurahan/desa yang terbagi ke dalam lima kecamatan tersebut. Seperti pada Tabel berikut:

Tabel 2.

Kecamatan serta Desa dan Kelurahan di Kota Ambon

Kecamatan	Desa	Kelurahan
Sirimau	4	10
Nusaniwe	5	8
Teluk Ambon	7	1
Teluk Ambon Baguala	6	1
Leitimur Selatan	8	-

Sumber: BPS Kota Ambon 2012

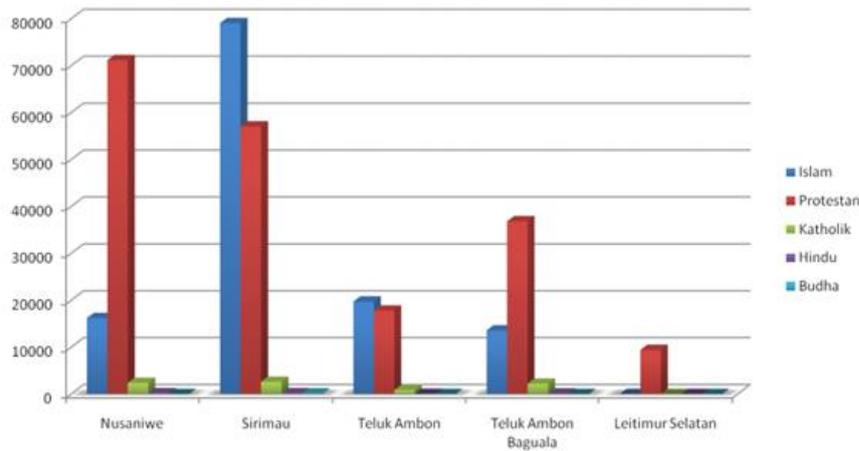
Berdasarkan Tabel di atas, kecamatan Sirimau merupakan wilayah yang memiliki desa/kelurahan paling banyak jika dibandingkan kecamatan lain. Kecamatan tersebut juga merupakan Ibu Kota dari Kota Ambon.

Hampir satu dekade pasca-konflik komunal, pertumbuhan penduduk Kota Ambon cenderung meningkat. Data sensus BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Ambon mencapai 5,65 persen, per tahun tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Maluku. Pertumbuhan penduduk ini berasal dari laju urbanisasi yang cenderung meningkat dan mulai kembalinya warga yang dahulu mengungsi ke Kota Ambon.

Jika dilihat persebaran penduduk Kota Ambon, kecamatan Sirimau menjadi wilayah terpadat, diikuti oleh kecamatan Nusaniwe, Teluk Ambon Baguala, Teluk Ambon, dan Leitimur Selatan. Sedangkan untuk desa (negeri adat) atau kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah desa Batumerah di kecamatan Sirimau, desa Passo di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, kelurahan Kudamati dan Benteng di kecamatan Nusaniwe.

Kepadatan penduduk di beberapa wilayah (kecamatan atau desa/kelurahan) dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, kepadatan penduduk di Kecamatan Sirimau terjadi karena wilayah tersebut merupakan pusat kota di mana banyak terdapat pasar, perkantoran, dan juga fasilitas umum lainnya. Selain itu, kepadatan penduduk di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh konflik masa lalu. Misalnya, kepadatan penduduk desa Batumerah dipengaruhi oleh banyaknya lokasi-lokasi pengungsi Muslim yang hijrah dari wilayah dalam dan luar Ambon karena faktor keamanan dan trauma konflik komunal masa lalu. Hal yang sama juga didapati di desa Passo dan kelurahan Kudamati yang menjadi tujuan lokasi menetap bagi komunitas Kristen dari dalam atau luar Ambon yang dahulu mengungsi saat konflik komunal terjadi.

Dilihat dari segi agama, penduduk Kota Ambon terdiri atas penganut Protestan 59 persen, Islam 39 persen, Katolik 2 persen, Hindu 0,13 persen, dan Budha 0,04 persen. Komposisi penduduk berdasarkan agama di Kota Ambon tidak mengalami perubahan signifikan dalam hal persentase jika dibandingkan dengan komposisi penduduk pada periode konflik komunal yang lalu. Dua komunitas besar, yakni Protestan/Kristen dan Muslim, masih dominan di Kota Ambon. Persebaran penduduk berdasarkan agama ini juga dapat dilihat berdasarkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Ambon pada Grafik 1.



Grafik 1.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Ambon.

Sumber: BPS Sensus Penduduk 2010.

Berdasarkan grafik di atas, pola persebaran penduduk berdasarkan agama memang cenderung memperlihatkan konsentrasi warga di kecamatan-kecamatan tertentu. Misalnya, warga Muslim cenderung bermukim di kecamatan Sirimau, Teluk Ambon, dan Nusaniwe; sedangkan warga Kristen mendominasi kecamatan Nusaniwe, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan.

Selain itu situasi politik di Kota Ambon tidak bisa dilepaskan dari momentum reformasi 1998. Sejak jatuhnya rezim orde baru, konstelasi partai politik yang menguasai peta kekuasaan di Kota Ambon juga mengalami perubahan. Partai-partai berhaluan sekuler menjadi penguasa di berbagai pemilu maupun pemilihan walikota Ambon. Selain itu, PDI Perjuangan (PDI-P) sebagai partai yang identik dengan simbol perlawanan terhadap orde baru muncul sebagai aktor politik yang mempunyai pengaruh besar.

Keberadaan PDI-P di Kota Ambon memiliki hubungan erat dengan komunitas Kristen di wilayah tersebut. Bahkan, beberapa pengurus maupun anggota partai tersebut merupakan fungsionaris Gereja Protestan Maluku (GPM) di Kota Ambon (Klinken, 2007). Lebih lanjut, peta politik di Kota Ambon yang terlihat dalam komposisi kursi di DPRD menunjukkan bahwa partai-partai sekuler masih mendominasi. PDI-P dan Partai Golkar masih menjadi dua partai yang dominan dalam perebutan kursi di DPRD pada tiap

pemilihan umum. Selain konstelasi partai politik, pelaksanaan pilkada Walikota Ambon juga mewarnai dinamika politik di Kota Ambon. Hal ini mulai terlihat menjelang pelaksanaan Pilkada Walikota Ambon pada bulan februari 2017. Di sepanjang jalan, mulai dari bandar udara Pattimura hingga desa Latuhalat di ujung Kota Ambon, sejumlah spanduk dan baliho bakal calon Walikota atau Wakil Walikota telah terpasang.

Di daerah kecamatan Sirimau yang merupakan pusat kota Ambon semarak pilkada juga ditandai dengan pernyataan-pernyataan tokoh masyarakat maupun anggota partai politik mendukung salah satu bakal calon melalui baliho dan spanduk yang terpasang di pinggir jalan kota Ambon. Isu yang ditawarkan oleh para bakal calon tersebut di antaranya peningkatan kesejahteraan, distribusi pembangunan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan transportasi. Selain itu, isu keamanan tetap didengungkan oleh para calon lewat berbagai media kampanye, seperti spanduk dan koran lokal. Isu kebersamaan dan solidaritas juga dimunculkan dalam berbagai pernyataan para bakal calon, seperti tagline calon petahana Richard – Syarif (PAPARISA): “Tarus Benahi Ambon (TABEA)”.

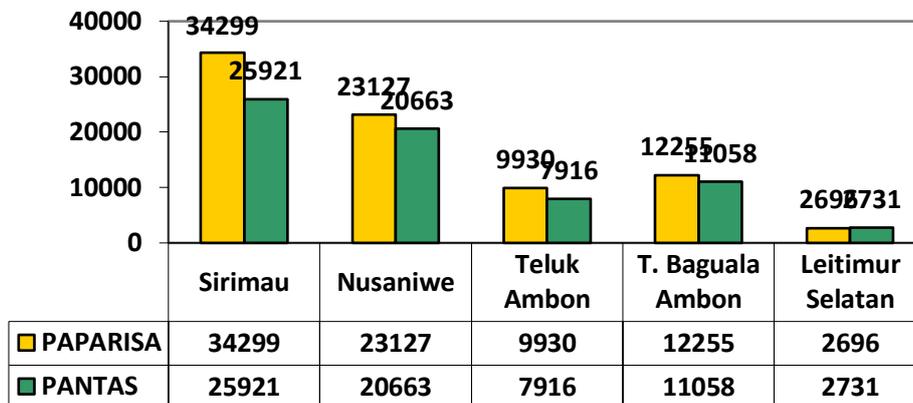
Konfigurasi bakal calon Walikota juga masih kental dengan semangat perimbangan kekuatan antara Muslim dan Kristen. Hampir setiap pasangan bakal calon memasang kandidat Walikota dari komunitas Kristen dan wakil Walikota dari komunitas Muslim atau sebaliknya. Pola ini memang menjadi tren di pilkada tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Maluku terkhususnya di kota Ambon. Seperti pada pilkada Gubernur 2008 di mana keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur selalu Kristen–Muslim atau sebaliknya.

Perimbangan ini juga memberikan satu pemahaman pada beberapa kalangan masyarakat bahwa sesudah dua periode Gubernur Maluku senantiasa dari kalangan Kristen, sekarang saatnya diganti dengan Gubernur yang berasal dari kalangan Muslim. Pernyataan tersebut memang tidak mewakili masyarakat Maluku secara keseluruhan, namun memberikan penegasan bahwa perimbangan kekuatan antar-komunitas menjadi bagian integral dalam proses politik perdamaian di Maluku. Namun demikian, pelaksanaan pesta demokrasi ini juga tidak lepas dari berbagai persoalan.

Salah satunya adalah adanya ketakutan manuver politik yang berujung pada kekerasan serta memicu konflik

Pada tanggal 15 Februari 2017 masyarakat Indonesia menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin dalam pemilihan kepala daerah serentak. Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 merupakan yang kedua kali diadakan di Indonesia, setelah sebelumnya dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu. Pilkada serentak tahun 2017 digelar di 101 daerah, yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Maluku berlangsung di kota Ambon dan empat kabupaten yaitu kabupaten Seram bagian barat, kabupaten Buru, kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tengah.

Pemilihan kepala daerah di kota Ambon diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah yang telah diusung oleh masing-masing partai pendukungnya. Berdasarkan perhitungan suara pada pilkada Kota Ambon tahun 2017, ditetapkanlah Richard Louhenapessy sebagai Walikota Kota Ambon dan Syarif Hadler sebagai Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak. Berikut adalah perolehan suara dua pasangan calon di tiap kecamatan Kota Ambon.



Grafik 2.

Hasil Perhitungan Suara Per Kecamatan di Kota Ambon 2017

Sumber: http://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/maluku/kota_ambon

Berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah Kota Ambon pada tanggal 15 Februari 2017 terlihat ada fenomena menarik dari partisipasi politik masyarakat. Sebelumnya, dalam survei yang

dilakukan Puskaolanda sejak 9 hingga 20 Januari 2017, menempatkan Paulus Kastanya dan M.A.S Latuconsina unggul 0,61 persen di atas Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler.

Hal itu juga dibuktikan Pada masa kampanye terakhir sehari setelah peringatan Hari Pers Nasional 2017 berakhir, dimana masa pendukung paslon Paulus Kastanya dan M.A.S Latuconsina yang didukung partai PDIP, Gerindra, Hanura, Demokrat, PKB, PKS, PBB, PAN, dan PKPI dibanjiri belasan ribu pendukungnya bahkan dua kali lebih banyak pendukung pasangan Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler yang hanya didukung tiga partai politik yakni Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Bangsa (PPP).

Hal ini membuat masyarakat berasumsi seakan-akan menjadi satu harga mati bahwa pasangan calon Paulus Kastanya dan M.A.S Latuconsina yang lebih dikenal dengan akronim (PANTAS) sudah di klaim menjadi pemenang dalam pesta demokrasi di kota Ambon. Tetapi kenyataannya terbalik ketika pada hari pemilihan serentak Pilkada di kota ambon hasil yang keluar justru pasangan Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler atau yang lebih dikenal dengan akronim (PAPARISA) yang memenagkan pemilihan walikota Ambon. Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan faktor apa yang mempegaruhi perilaku pemilih di kota Ambon?

Faktor-Faktor Perilaku Pemilih Di Kota Ambon

Untuk melihat perilaku pemilih ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui buku-nya yang berjudul Political Science and Political Behavior, menyatakan terdapat tiga model untuk menganalisis perilaku pemilih, yakni pendekatan sosiologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional. Merujuk pada hasil studi serta pendekatan-pendekatan di atas, penelitian ini mencoba menggambarkan dan menganalisis tentang kecenderungan perilaku pemilih. Ketiga pendekatan ini akan diuraikan lebih lanjut.

Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam

pemilihan dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Perilaku pemilih di Kota Ambon dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya pada umumnya karena faktor sosiologis. Hal demikian karena hampir semua informan yang diteliti dalam menjatuhkan pilihannya kepada seorang kandidat sama dengan pilihan orang tuanya. Dimana menurut peneliti, pilihan perilaku pemilih tersebut tersebut dipengaruhi latar belakang lingkungan tempat tinggal, yakni lingkungan keluarganya. Berikut jawaban mereka ketika ditanya terkait bagaimana mereka memberikan suara dan menjatuhkan pilihannya pada saat pemilihan. Pernyataan kemudian diutarakan oleh beberapa informan:

“Pada pemilihan kepala daerah kota Ambon ini saya memberikan suara dan menjatuhkan pilihan saya kepada PAPARISA karena orang tua saya pun demikian”. (Ikbal, batumerah).

“Semua keluarga saya memilih PANTAS, Makanya saya secara pribadi ikut memilih beliau”. (jhon, kudamati).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perilaku yang ikut-ikutan. Perilaku ikut-ikutan demikian disebabkan karena mereka tidak mampu dan melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang tepat menurut mereka. Selain itu, keputusan politik mereka masih belum bulat menyebabkan pilihan politik mereka mudah mendapat pengaruh dari lingkungan dan pengelompokan sosial yang terbentuk di tempat tinggal mereka, khusus di dalam keluarga dan orangtua. Menurut mereka orang tua lebih tahu mana yang terbaik dan benar dan informasi yang didapatkan cukup terbatas. Hal demikian lebih lanjut diutarakan oleh informan:

“Memang benar di sini kami di suruh oleh tokoh pemuda untuk memilih PANTAS karena pak poly perwakilan dari desa Kudamati tapi saya memilih bukan karena di paksa. Melainkan mengikuti pilihan orang tua saya”. (John, kudamati).

Pernyataan diatas jelas menunjukkan bahwa perilaku ikut-ikutan juga diakibatkan karena kurangnya mental pemilih untuk menentukan pilihan mereka juga belum tahu bagaimana memilih pemimpin yang tepat. Meskipun demikian, perilaku tersebut menunjukkan Adanya preferensi pilihan yang sama dengan preferensi pilihan orangtuanya. Hal ini sejalan

dalam pendekatan sosiologis yang melihat hubungan antara predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Menurut Gerald Pomper predisposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang berkaitan dengan perilaku memilih seseorang. Misalnya, preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah, atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak.

Predisposisi sosial ekonomi bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya. Namun, Perilaku demikian tidak lepas dari isu yang didapatkan oleh seorang anak lebih banyak berasal di dalam keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan seorang anak. Waktu yang mereka gunakan di lingkungan keluarga juga lebih banyak dibandingkan di lingkungan. Selain dari penjelasan Gerald Pomper di atas, David Apter menguraikan tentang pengaruh dari keluarga terhadap anak dalam memilih yaitu adanya kesamaan pilihan seorang anak dengan pilihan orangtuanya. Bahwa, “adanya kesejajaran atau kesamaan pilihan antara orangtua dengan anaknya merupakan suatu yang wajar. Sebab pada lembaga keluarga itulah seseorang pertama kali mempunyai akses pembentukan identitas diri, mempelajari nilai-nilai lingkungan dan sosial mereka, termasuk peran politiknya.

Pada proses paling dini, pembentukan sikap-termasuk pembentukan sikap politik anak-pertama kali di lingkungan keluarga. fase ini merupakan fase belajar keluarga karena pada fase ini anak-anak pertama kali mulai belajar dari orangtuanya tentang perasaan orangtua mereka terhadap pemimpin politik, perasaan orangtua mereka terhadap isu-isu politik dan sebagainya. Hal demikian menyebabkan akses komunikasi yang diterima di lingkungan keluarga lebih mudah., ikatan-ikatan sosilogis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih berkaitan untuk melihat perilaku memilih seseorang. Sejalan dengan itu, dalam penelitian ini tidak banyak diantara pemilih yang preferensi pilihannya sama dengan orang tuanya karena faktor ikut-ikutan tapi juga karena mendapat arahan/desakan dari orang tuanya. Mereka ikut berpartisipasi itu karena arahan/desakan orangtua untuk memilih kandidat yang sama dengan orangtuanya. Seperti yang diutarakan:

“Sebenarnya saya tidak tahu menahu dan tidak ingin terlibat atau berpartisipasi dalam pemilihan namun karena orang tua mengajak untuk memilih kandidat yang mereka pilih maka saya ikut saja”.
(Ikbal, batumerah).

“Saya tidak begitu paham dan mengikuti perkembangan politik. Tapi orangtua saya menyuruh untuk memilih seorang kandidat yang dirasa layak yaitu PAPARISA meskipun sebagian besar masyarakat di kecamatan Leitimur Selatan mendukung PANTAS karena Paulus Kastanya adalah putra daerah dari kecamatan Leitimur selatan”.
(Buce, kilang).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka diarahkan oleh orang tuanya karena tidak tahu-menahu dan kurang paham mengetahui isu politik. Model perilaku ini tidak banyak yang dialami oleh seorang anak terhadap orang tuanya karena dengan sendirinya mereka akan senantiasa dan membenarkan apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Dalam hal ini perilaku pemilih ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu. Perilaku demikian merupakan partisipasi yang dimobilisasi.

Menurut Huntington dan Nelson mengenai partisipasi mobilisasi adalah partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain sangat berkaitan terhadap partisipasi individu atau kelompok. Namun, perilaku orang tua yang demikian biasa menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin atau wakilnya yang tepat didaerahnya. Menurut peneliti, perilaku pemilih mudah diintimidasi, khususnya dalam menetapkan pilihannya pada pemilih sebagaimana sifat mereka yang sangat rentang dan masih labil. Dalam penelitian ini, orangtua sebagai lingkungan sosial terdekat sangat mempengaruhi pilihan seorang anak. Dimana dalam lingkungan keluarga terjadi proses sosialisasi.

Dari proses sosialisasi kemudian Pemilih menyerap informasi berupa isu-isu tema dan kandidat lebih dominan daripada lingkungan sekolah, teman sebaya, dll. Lebih lanjut menurut peneliti, bahwa adanya pemilih yang tidak banyak tahu keikutsertaan dan dalam menjatuhkan

pilihan terhadap seorang kandidat menunjukkan tipe apatis mereka. Tipe ini menunjukkan perilaku acuh tidak acuh di kalangan pemilih, khususnya pemilih yang dilatar belakangi karena persepsi tidak pentingnya mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada.

Pertanyaan lebih mendetail kemudian peneliti mencoba mengajukan pertanyaan guna memperoleh gambaran yang jelas meliputi, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang dilaksanakan pada 15 februari 2017 tersebut. Pertanyaan yang berupa siapa calon kandidat yang menjadi pilihan saudara dan saudari dan apa alasan kemudian memilih calon tersebut?. Dari hasil penelitian ini, banyak diantara pemilih yang di yang diwawancarai menjatuhkan pilihan politiknya karena adanya kesamaan sebagai putra daerah. Sebagian besar pemilih yang diteliti lebih melihat calon kandidat yang terpilih merupakan putra daerah yang sangat ideal menjadi pemimpin dan menampung aspirasi masyarakat. Berikut pendapat salah satu informan yang diwawancarai ketika ditanya tentang figur walikota yang terpilih.

“Saya memilih pasangan PANTAS karena Paulus Kastanya bertempat tinggal di desa yang sama dengan saya, buat apa memilih pemimpin lain sementara kita memiliki calon pemimpin dari desa sendiri”. (Hanni, kudamati)

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa pemilih memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon karena calon Walikota tersebut berasal dan tinggal di daerah yang sama dengan pemilih. Hal ini juga menegaskan bahwa kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang terpilih menentukan tingginya perilaku pemilih dilihat dari sudut pandang sosologisnya masyarakat di Kota Ambon. Dari fenomena tersebut dijelaskan pada pendekatan sosiologis yang melihat perilaku pemilih dimana seperti dalam Penelitian Pern Arnt Peterson dan Lawrence E. Rose di Norwegia. Dalam Penelitiannya menunjukkan bahwa ikatan ikatan kedaerahan, seperti desa-kota, merupakan faktor yang cukup signifikan dalam menjelaskan aktivitas dan pilihan politik seseorang. Ikatan kedaerahan terutama sangat kuat dalam mempengaruhi pilihan seseorang terhadap calon.

Penelitian Potoski juga menunjukkan bahwa para kandidat presiden atau parlemen, umumnya lebih diterima dan dipilih para pemilih yang berasal dari daerah yang sama. Begitu kuatnya posisi variable kedaerahan ini, ketika melaporkan penelitiannya Potoski mengawali tulisannya sebagai berikut: “it is a political axiom that candidates tend to poll better in their home areas than they do elsewhere”. (suatu aksioma politik jika para kandidat cenderung lebih baik memilih di sekitar rumahnya daripada mereka harus melakukannya ditempat lain).

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama suku dan ras.

Pendekatan Psikologis

Menurut pendekatan psikologis ada beberapa faktor yang mendorong pemilih menentukan pilihannya, yaitu: identifikasi partai, orientasi kandidat, dan orientasi isu/tema. Pertama, identifikasi partai digunakan untuk mengukur sejumlah faktor predisposisi pribadi maupun politik. Seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu. Pengalaman pribadi dan orientasi politik sering diwariskan oleh orang tua, serta dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis. Namun, figur calon yang dianggap memiliki kharismatik dan sosok idaman bagi masyarakat dalam penelitian ini lebih mempengaruhi psikologis pemilih, mengingat kecenderungan pemilih menjatuhkan pilihannya karena adanya konteks ketokohan yang berperan dominan. Sebagaimana yang diungkapkan seorang informan:

“Pak Richard merupakan idola saya karena sudah terbukti kepemimpinannya. Bukan hanya janji tetapi bukti”. (Lusy, Passo)

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pemilih memilih calon kandidat Walikota dan Wakil Walikota Ambon karena pemilih mengidolakan kandidat tersebut berdasarkan kepemimpinannya yang sudah terbukti dan terealisasi. Pernyataan ini menunjukkan adanya perilaku yang psikologis pada pemilih. Dimana pemilih menjatuhkan pilihan pada

figur kandidat yang mereka idolakan. Meskipun tidak banyak diantara menunjukkan perilaku model ini. Menurut peneliti, adanya perilaku psikologis kedekatan pemilih terhadap figur kandidat yang mereka anggap mampu memimpin daerahnya.

Dalam pendekatan psikologis, Adanya pemilih yang mengidolakan seorang kandidat adalah hasil evaluasi terhadap kandidat. Evaluasi terhadap kandidat sangat dipengaruhi oleh sejarah dan pengalaman masa lalu kandidat baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Selain itu ada beberapa indikator yang biasa dipakai oleh para pemilih untuk menilai seseorang calon, khususnya bagi para calon yang hendak mencalonkan kembali karena tidak terpilih, di antaranya kualitas kompetensi, dan integritas kandidat. Sebagaimana penilaian yang diutarakan oleh salah satu informan:

“Saya lebih memilih kandidat yang sudah terbukti mampu memimpin Kota Ambon dan selain itu, Saya lebih mengenal kandidat tersebut di bandingkan dengan kandidat lainnya karena memang memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik”. (Ampy, passo).

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pemilih memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon karena adanya evaluasi terhadap masa kepemimpinannya pada periode sebelumnya. Dimana telah dibahas di atas bahwa evaluasi terhadap kandidat ini karena sejarah atau masa lalu kandidat. Hal ini yang kemudian mempengaruhi penilaian pemilih terhadap kandidat. Berbeda dengan yang diutarakan infoman lain:

“Alasan saya memilih PPARISA karena saya sangat segan terhadap Bapak Syarif, orangnya dermawan dan baik kepada siapa saja terutama buat warga desa batumerah”. (Dula, batumerah).

Selain itu hasil wawancara juga menunjukan bahwa adanya ikatan emosional dari pemilih terhadap kandidat karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang dia terima. Perilaku tersebut di jelaskan oleh Mark N. Franklin, “sosialisasi politik yang diterima seseorang pada masa kecil, baik dari lingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali

mereka memilih”. Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang, sebagai refleksi dari kepribadian seseorang, merupakan variabel yang cukup menentukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis, menurut Richard Rose dan Ian Mc. Allicer, menekankan pada tiga aspek psikologi sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada satu parpol, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

Menurut peneliti, dalam prakteknya, pendekatan sosiologis saling berkaitan dengan pendekatan psikologis. Seseorang yang memilih seorang kandidat bisa jadi atas pertimbangan kesamaan suku dan agama. Namun hal itu diperantarai oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis tersebut maupun terhadap partai politik atau kandidat. Yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara objektif, melainkan faktor sosiologis sebagaimana dipersepsikan. Dalam prosesnya, pentingnya faktor sosiologis akan terkait dengan faktor psikologis.

Pendekatan Rasional

Pendekatan pilihan rasional (rational choice) atau lazim disebut sebagai pendekatan ekonomik berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang setelah memperoleh konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam macam pandangan. Salah satu tokoh penting yang mengagas pendekatan ini adalah V. O. Key. menurut V. O. Key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.

Secara independen ada informan yang memilih karena alasan rasional mengapa kandidat tersebut harus dipilih dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan kandidat lainnya. Hingga kemudian mereka mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mereka terima terkait kandidat tersebut. Berikut petikan hasil wawancara dengan beberapa informan:

“Saya memilih PAPARISA karena kandidat tersebut memiliki banyak penghargaan (adipura) dan sudah terbukti memiliki kepemimpinan yang baik”. (Jefry, kilang)

“Saya melihat kedekatan kandidat dengan masyarakat terutama pak Richard yang telah lama membantu memberikan sumbangan kursi Greja dan Mesjid bagi desa kami”. (Viken, poka).

“Alasan saya memilih PPARISA karena telah datang beberapa kali memberikan bantuan dan mengikuti kegiatan desa dan keagamaan di desa kami”. (Faisal, poka).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilih menetapkan pilihannya terhadap calon kandidat tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Selain dari prestasi yang sudah dilakukan calon kandidat tersebut dalam membangun Kota Ambon, pemilih juga melihat kedekatan calon tersebut dengan masyarakat dan bantuan apa saja yang sudah diberikan calon kandidat tersebut untuk desanya.

Secara independent pemilih menjatuhkan pilihannya dengan alasan rasional. Disinilah peneliti dapat melihat adanya perilaku yang rasional pada pemilih. Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Menurut V. O. Key, yang menentukan pilihan para pemilih adalah sejauh mana kinerja pemerintah, partai, atau wakil-wakil mereka baik bagi dirinya sendiri atau bagi negaranya, atau justru sebaliknya.

V. O. Key melihat kecenderungan masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja kandidat yang menjalankan pemerintahan pada periode sebelumnya sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya.

KESIMPULAN

Pendekatan sosiologis, tidak sedikit pemilih yang menunjukkan model perilaku memilih ini dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dimana adanya faktor kesamaan daerah masih mempengaruhi perilaku pemilih terhadap seorang kandidat. Selain itu, juga menunjukkan tingkat kesamaan pilihan atau preferensi politik di lingkungan keluarga pemilih.

Pendekatan psikologis, dalam penelitian ini pemilih menunjukkan perilakunya dengan mengidentifikasi kandidat dengan penilaian dan sikap. Hal itu, disebabkan adanya keterkaitan atau saling berhubungan antara

faktor sosiologis dan psikologis. Dalam proses terbentuknya perilaku ini dilatar belakangi oleh faktor sosiologis. Dimana pemilih dalam menjatuhkan pilihannya mengedepankan persepsi terhadap kandidat dan kemudian menentukan sikap.

Pendekatan pilihan rasional, dalam penelitian ni pemilih memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan kandidat tersebut. Selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dari seorang kandidat. Tidak sedikit diantara pemilih yang menunjukkan model ini. Namun, rasionalitas yang mereka tunjukkan pula tidak lepas dari faktor sosiologis. Dimana informasi yang didapatkan atau diterima pemilih lebih dominan berasal dari argument atau pendapat masyarakat, orangtuanya, serta media massa yang kemudian membentuk perilaku rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirrachman, A. (Ed.). (2007) *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta, Indonesia: The International Centre for Islam and Pluralism (ICIP).
- Amirrachman, A. (2012) *Peace Education in the Mollucas: Between Global Models and Local Interests*. Disertasi, University of Amsterdam.
- Asfar, Muhammad (2006) *Pemilu & Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya : Pustaka Eureka.
- David Apter (1985) *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES. 262-267.
- Kavanagh, Dennis (1983) *Political Science and Political Behaviour*, Allen and Unwin (Chapter 1).
- Kenneth D. Wald and Samuel Shye (1995) *Religious Influence in Electoral Behavior: The Role of Institutional and Social Forces in Israel*. dalam *The Journal of Politics*, Vol. 57. No. 2. 495-507.
- Mark N. Franklin (1995) *Voting Behavior*, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc).

- Matthew Potoski (1994) *Friends and Neighbors Voting in Gubernatorial and Senatorial Primaries*, *Southeastern Political Review*, Vol. 22, No. 3. 543-548.
- Pamungkas, Sigit (2010) *Pemilu, Perilaku Pemilih & Kepartaian*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pomper, G. (1987) *Voter's Choice: Varieties of American Electoral Behavior*. New York: Dod Mead Company.
- Ratnawati, T. (2006) *Antara Kekerasan dan Kontestasi Politik: Membangun Demokrasi Pasca Konflik Kasus Ambon*. In T. Ratnawati & N. Kleden-Probonegoro (Eds.). *Wacana Politik dan Budaya di Masa Transisi* (pp. xxx-xxx). Jakarta: LIPI.
- Roth, Dieter (2009) *Studi Pemilu Empiris*. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung-fur die Freiheit.
- Surbakti, Ramlan. (2010) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tomagola, dkk, (2005) *Format Ulang Birokarasi Kota Ambon*, Final Report Penelitian Birokarasi kota Ambon kerjasama antara, Decentralization Support Facility, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, The Royal Embassy of Netherlands. Ambon.